

RENCANA AKSI KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan PP dan PL pada RPJMN & RENSTRA	Indikator Kinerja RAP	Usulan Indikator Kinerja RAK/Bagian	Definisi Operasional	Sumber Data dan Mekanisme Pengumpulan Data	Cara Perhitungan	Target Indikator					Penanggung jawab
								2015	2016	2017	2018	2019	
Dukungan Administrasi dan Manajemen	Meningkatnya dukungan Administrasi dan Manajemen	Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk	Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA adalah jumlah Satuan Kerja Program PP dan PL yang mendapatkan penilaian SAKIP dengan hasil AA selama satu tahun.	DIPA Induk Ditjen P2P	Jumlah anggaran yang tidak diblokir dibagi jumlah total anggaran pada DIPA Induk	80	80	80	80	80	PI Program
			Persentase laporan program Ditjen PP dan PL terverifikasi disampaikan tepat waktu	Persentase laporan program Ditjen PP dan PL terverifikasi disampaikan tepat waktu	Laporan program meliputi laporan rutin baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan lingkup Ditjen PP dan PL yang disampaikan sesuai dengan periodisasinya	Laporan rutin bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan	Jumlah laporan rutin ditahun berjalan yang dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan rutin ditahun yang sama	80	80	80	80	80	PI Evapor
			Persentase Satker Program PP dan PL yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	Persentase Satker Program PP dan PL yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	Yang dimaksud dengan Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi adalah satker yang memiliki Tim Pengelola Data dan Pangkalan Data yang mutakhir dan terpublikasi sekurang-kurangnya pada aplikasi eMovev PPPL dan Komdat, memiliki dokumen data dan informasi web dan profil, perencanaan berbasis data	Dashboard PPPL, Laporan Profil, Web satker, data dukung usulan RKAKL,	Jumlah satker yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi dibagi seluruh satker PPPL di tahun yang sama	50	60	70	80	90	PI Datin
			Persentase layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian	Persentase jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dalam satu tahun	dokumen pengelolaan kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian dibagi total layanan administrasi kepegawaian yang direncanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen	100	100	100	100	100	Pegum
			Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	Persentase jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang dilaksanakan dalam satu tahun	Dokumen pengelolaan ketatausahaan dan gaji	Jumlah layanan ketatausahaan dan gaji yang dilaksanakan dibagi total layanan ketatausahaan dan gaji yang direncanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen	100	100	100	100	100	Pegum
			Persentase layanan kerumahtangga, pengelola BMN dan ULP	Persentase layanan kerumahtangga, pengelola BMN dan ULP	Persentase jumlah layanan kerumahtangga, pengelolaan BMN dan ULP yang dilaksanakan dalam satu tahun	laporan pelaksanaan layanan pengadaan, laporan layanan kerumahtangga, dan dokumen pengelolaan BMN,	Jumlah layanan kerumahtangga, Pengelolaan BMN, dan layanan ULP yang dilaksanakan dibagi layanan kerumahtangga, Pengelolaan BMN, dan layanan ULP yang direncanakan pada tahun berjalan dikali seratus persen	100	100	100	100	100	Pegum
			Persentase Satker yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase Satker yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan taat dengan ketentuan	tersusunnya laporan keuangan tingkat Eselon 1 yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik kualitatif yakni laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi unsur-unsur: relevan, andal, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, dan dapat dipahami oleh pengguna	Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari: LRA(Laporan Realisasi Anggaran), Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang disusun secara teratur, tepat waktu, akuntabel dan paripurna. Laporan tersebut diperoleh dari kegiatan verifikasi akuntansi yang antara lain meliputi laporan bulanan/Triwulanan (dilampirkan hasil rekonsiliasi dengan KPPN setempat masing-masing satker), laporan keuangan semester, dan laporan keuangan Ditjen PP dan PL tahunan baik unaudited maupun audited.	Jumlah satker dibagi satker sebanyak 216 satker yang terdiri	100	100	100	100	100	Keuangan
			Persentase Satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNPB yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase Satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNPB yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Satker yang menyampaikan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).	Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Bukan Pajak setiap triwulan Kementerian Negara/Lembaga wajib disampaikan laporan Penerimaan dan Penggunaan dana PNPB ke Kementerian Keuangan.	Jumlah Penggunaan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan	100	100	100	100	100	Keuangan
Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Satker yang menyusun dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah Satker yang melakukan penatausahaan, pembukuan, dan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan peraturan menteri keuangan pada Satker yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara atas pengelolaan uang negara yang disusun setiap bulannya yang disusun secara transparan dan terkomputerisasi, diperiksa dan melalui proses rekonsiliasi internal dengan Kepala Satker serta melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN	Jumlah satker yang telah menyusun laporan yang transparan	100	100	100	100	100	Keuangan			
			Persentase UPT yang kinerja kalkifikasinya sesuai standar	Persentase UPT yang kinerja kalkifikasinya sesuai standar	capaian kinerja KKP dan BTKLPP berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi klasifikasi KKP berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2004 dan BBTCLPP berdasarkan Permenkes Nomor 266 Tahun 2004 selama satu tahun.	Hasil penilaian yang diperoleh dari hasil evaluasi klasifikasi KKP berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2004 dan BBTCLPP berdasarkan Permenkes Nomor 266 Tahun 2004 selama satu tahun.	Jumlah KKP dan BBTCLPP yang nilai evaluasi klasifikasinya r	60	70	80	90	100	Hukormas

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan PP dan PL pada RPJMN & RENSTRA	Indikator Kinerja RAP	Usulan Indikator Kinerja RAK/Bagian	Definisi Operasional	Sumber Data dan Mekanisme Pengumpulan Data	Cara Perhitungan	Target Indikator					Penanggung jawab
								2015	2016	2017	2018	2019	
			Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Jumlah KKP dan BTKLPP yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ditjen PP dan PL kepada Menteri Kesehatan untuk mendapatkan penetapan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Kesehatan setelah dilakukan penilaian berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 selama satu tahun.	Hasil penilaian berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 selama satu tahun.	Jumlah KKP dan BTKL PP yang nilai berdasarkan Permenpan RB	-	2	4	6	8	Hukormas
			Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disusun	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disusun	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Program PP dan PL yang disusun, dibahas dan/atau direvisi meliputi; RUU, RPP, Rancangan Perpres, dan Rancangan Permenkes selama satu tahun	dokumen rancangan regulasi/ peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 tahun anggaran	Jumlah dokumen rancangan regulasi/ peraturan perundang-undangan	25	25	25	25	25	Hukormas
			Jumlah peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan program PP dan PL yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun	Peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun	Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP dan PL, meliputi; UU, PP, Perpres, dan Permenkes yang dipublikasikan, didesiminasikan, dan/atau disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas program dan lintas sektor selama satu tahun	100	100	100	100	100	Hukormas
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PL melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun.	surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun yang disampaikan ke Ditjen PP dan PL	Jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen PP dan PL melalui surat pengaduan resmi dari masyarakat dalam satu tahun	60	70	80	90	100	Hukormas
			Jumlah media informasi program PP dan PL	Jumlah media informasi program PP dan PL	Jumlah absolut media informasi Ditjen PP dan PL yang meliputi; newsletter, warta, jurnal dan media audio visual yang diterbitkan dalam satu tahun	newsletter, warta, jurnal dan media audio visual yang diterbitkan dalam satu tahun	Dihitung dari jumlah media informasi Ditjen PP dan PL yang diterbitkan dalam satu tahun	8	8	10	10	10	Hukormas
Dukungan Administrasi dan Manajemen	Meningkatnya dukungan Administrasi dan Manajemen	Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	Persentase Satker UPT yang memiliki aset tanah milik Kementerian Kesehatan	Persentase Satker UPT yang memiliki aset tanah milik Kementerian Kesehatan	Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki tanah milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya dibagi jumlah satker UPT dikali 100%	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker UPT yang memiliki gedung milik Kementerian Kesehatan	Persentase Satker UPT yang memiliki gedung milik Kementerian Kesehatan	Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki bangunan milik Kemenkes sebagai kantor sampai tahun 2015 melalui salah satu transaksi pembelian, hibah, transfer masuk dari pihak lain sesuai kewenangannya dibagi jumlah satker UPT dikali 100%	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi	Persentase Satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi	Jumlah satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2015.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sampai dengan tahun 2015.	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	Persentase Satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas penunjang perkantoran sampai dengan tahun 2015.	Laporan SIMAK BMN Satker di lingkungan Ditjen PP dan PL	Jumlah satker UPT yang memiliki fasilitas penunjang perkantoran sampai dengan tahun 2015.	50%	56%	60%	64%	69%	Pegum
			Persentase Satker program PP dan PL yang menerapkan manajemen data dan informasi	Persentase Satker program PP dan PL yang menerapkan manajemen data dan informasi	Yang dimaksud dengan penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi adalah satuan kerja kantor pusat, kantor daerah (UPT) dan Dekonsentrasi yang telah memiliki tim pengelola data dan pangkalan data yang mutakhir dan terpublikasikan sekurang - kurangnya pada aplikasi eMoney PPPL dan atau Simkespel, memiliki dokumen data dan informasi web dan atau profil, perencanaan berbasis data.	aplikasi eMoney PPPL dan atau Simkespel, dokumen data dan informasi web dan atau profil, perencanaan berbasis data.	Jumlah satker yang telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Penerapan manajemen pengelolaan data dan informasi dibagi seluruh satker PPPL di tahun yang sama dikali 100%	50%	60%	70%	80%	90%	Pegum